



Evaluasi Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Jalanan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Kampung Anak Negeri Kota Surabaya

Clariza Trisardhana¹, Susi Ratnawati², Fierda Nurany³

^{1,2,3}Program Studi Administrasi Publik, Universitas Bhayangkara Surabaya, Indonesia

¹clarizaica1307@gmail.com

²susiratna11@gmail.com

³fierdanurany@ubhara.ac.id

Abstrak

Indonesia menduduki peringkat keempat negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Hal ini membuat Indonesia memiliki resiko besar terhadap meningkatkannya angka Penyandang Cacat Kesejahteraan Sosial (PMKS), salah satunya anak jalanan. Anak jalanan mewakili populasi berisiko, biasanya berusia antara 5 dan 18 tahun, yang sering ditemukan di tempat umum karena berbagai faktor yang berkontribusi seperti kesulitan ekonomi berpotensi melakukan aktivitas illegal. Mengingat tantangan-tantangan ini, penting bagi badan-badan pemerintah untuk melakukan intervensi dan melindungi anak muda yang rentan ini. Mengurangi jumlah anak jalanan dan memfasilitasi keberhasilan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat merupakan dua tujuan utama dari upaya layanan dan rehabilitasi anak jalanan. Tujuan penelitian pada program ini adalah untuk memberikan anak-anak ini informasi dan keterampilan dasar yang akan meningkatkan kesejahteraan mereka di masa depan. Partisipan kunci dalam penelitian yang menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif ini adalah para pegawai, anak jalanan, dan pimpinan tata usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Kampung Anak Negeri. Oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi program guna mengetahui apakah suatu program tersebut sudah mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan atau belum dalam suatu program. Kesimpulan pada hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini tampaknya cukup berhasil dalam mengatasi permasalahan anak jalanan di Kota Surabaya, berdasarkan implementasi kebijakan yang ditunjukkan oleh indikator-indikator utama seperti efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, daya tanggap dan akurasi.

Kata Kunci: Anak, Evaluasi, Jalanan, Rehbilitasi, Sosial.

Abstract

Indonesia is ranked fourth in the country with the largest population in the world. This puts Indonesia at great risk of increasing the number of People with Social Welfare Disabilities (PMKS), one of which is street children. Street children represent an at-risk population, usually aged between 5 and 18 years, who are often found in public places due to various contributing factors such as economic difficulties, potentially carrying out illegal activities. Given these challenges, it is important for government agencies to intervene and protect these vulnerable young people. Reducing the number of street children and facilitating their successful

reintegration into society are the two main goals of street child service and rehabilitation efforts. The goal of the program is to provide these children with basic information and skills that will improve their well-being in the future. The key participants in this research which used a qualitative descriptive research approach were employees, street children, and administrative leaders of the State Children's Village Technical Implementation Unit. Therefore, it is necessary to carry out program evaluations to find out whether a program has achieved the expected goals and objectives or not in a program. The research conclusion shows that this program seems to be quite successful in overcoming the problem of street children in the city of Surabaya, based on policy implementation as shown by main indicators such as effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness and accuracy.

Keywords: Children, Evaluation, Rehabilitation, Social, Street.

1. Pendahuluan

Jumlah penduduk Indonesia, negara yang masih dalam tahap awal pembangunan, tumbuh dengan pesat, terutama di wilayah perkotaan. Badan Pusat Statistik (BPS), lembaga pengumpul data utama negara, memperkirakan pada pertengahan tahun 2022, jumlah penduduk akan meningkat menjadi sekitar 275,77 juta jiwa. Hasilnya, Indonesia akan menduduki peringkat keempat negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Jumlah ini lebih tinggi 1,13% dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 272,68 juta orang. Ledakan populasi seperti ini dapat memperburuk sejumlah masalah sosial, seperti pengangguran, kemiskinan, dan penelantaran, dan masih banyak lagi.

Masyarakat atau keluarga penyandang disabilitas kesejahteraan sosial (sering disingkat PMKS) menghadapi beberapa kendala atau gangguan yang menyulitkan mereka dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya secara efisien. Oleh karena itu, mereka merasa sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, baik kebutuhan sosial, emosional, maupun fisik (Suleman dkk., 2019:32). Hambatan-hambatan ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk kesulitan dalam kehidupan mereka, cacat fisik, pengabaian sosial, atau kesulitan keuangan. Kelompok PMKS sangat beragam; Hal ini mencakup, antara lain, anak-anak kecil terlantar, remaja tunawisma, orang lanjut usia yang terlantar, pengemis, tunawisma, penyandang berbagai macam disabilitas, dan orang-orang yang tidak mempunyai tempat tinggal.

Pada tahun 2019 terdapat sekitar 600.000 orang di wilayah yang ditetapkan sebagai Penyandang Cacat Kesejahteraan Sosial (PMKS), menurut data Dinas Sosial Jawa Timur. Rinciannya sebagai berikut: sekitar 14.500 bayi baru lahir terlantar, 118.000 anak terlantar, 173.000 orang lanjut usia terlantar, 23.000 anak penyandang disabilitas, dan hampir 1.900 anak muda yang hidup di jalanan (Dinas Sosial Jawa Timur, 2019). Angka-angka yang dapat diakses saat ini menunjukkan bahwa permasalahan PMKS di Jawa Timur merupakan permasalahan yang signifikan dan mungkin akan semakin parah di tahun-tahun mendatang.

Dari seluruh kelompok masyarakat yang mengalami Tantangan Kesejahteraan Sosial (PMKS), anak jalanan merupakan salah satu kelompok yang perlu ditangani saat ini karena mereka merupakan kelompok yang sangat memprihatinkan. Peningkatan jumlah anak jalanan yang tinggal di Surabaya, sebuah kota besar, setiap tahunnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur, kota ini menjadi rumah bagi 59 anak-anak tersebut pada tahun 2019.

Penting untuk diingat bahwa angka-angka tersebut mungkin terlalu rendah karena tidak semua anak jalanan dimasukkan dalam data BPS.

Anak jalanan mewakili populasi berisiko, biasanya berusia antara 5 dan 18 tahun, yang sering ditemukan di tempat umum karena berbagai faktor yang berkontribusi seperti kesulitan ekonomi, perselisihan keluarga, dan pengaruh sosial atau budaya. Anak-anak ini umumnya ditemukan di persimpangan sibuk, pasar, pusat transportasi, dan ruang publik serupa. Mereka melakukan berbagai aktivitas untuk mencari nafkah, termasuk tampil di jalanan, bekerja kasar, mengemis, menjadi kuli sementara saat cuaca hujan, atau berjualan koran. Meskipun beberapa orang mungkin melakukan aktivitas ilegal seperti pencurian, perkelahian, atau penyalahgunaan obat-obatan terlarang, mereka juga mempunyai risiko lebih tinggi untuk menjadi korban kekerasan atau kerja tidak berbayar. Mengingat tantangan-tantangan ini, penting bagi badan-badan pemerintah untuk melakukan intervensi dan melindungi individu-individu muda yang rentan ini.

Sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang telah diperbarui, yang merupakan perubahan atas Undang-undang Perlindungan Anak tahun 2002 yang asli, pasal 22, 24, 25, dan 26 dengan jelas menunjukkan peran dan tanggung jawab lembaga negara dan pemerintah. Secara khusus, entitas-entitas ini diharuskan memfasilitasi dan menyediakan infrastruktur yang diperlukan untuk perlindungan anak yang efektif. Mereka juga berkomitmen untuk memastikan bahwa anak-anak dapat mengekspresikan pandangan mereka dengan aman, dengan mempertimbangkan usia dan perkembangan kognitif mereka. Selain itu, masyarakat luas juga ikut bertanggung jawab atas perlindungan anak, dengan berkontribusi melalui inisiatif dan kegiatan yang dipimpin oleh masyarakat. Untuk menyelaraskan prinsip-prinsip tersebut, Dinas Sosial Surabaya telah meluncurkan program khusus yang ditujukan untuk layanan dan rehabilitasi anak-anak yang hidup di jalanan. Program ini dibangun sejalan dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2020 yang fokus pada Asistensi Rehabilitasi Sosial.

Mengurangi jumlah anak jalanan dan memfasilitasi keberhasilan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat merupakan dua tujuan utama dari upaya layanan dan rehabilitasi anak jalanan. Tujuan program ini adalah untuk memberikan anak-anak ini informasi dan keterampilan dasar yang akan meningkatkan kesejahteraan mereka di masa depan. Hal ini juga menekankan pelatihan moral dan sosial untuk mengubah kebiasaan berpikir negatif yang mungkin dimiliki anak-anak.

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang kadang disebut juga Kampung Anak Surabaya merupakan salah satu fasilitas khusus yang bertujuan untuk merehabilitasi anak jalanan di Surabaya. Untuk menanggulangi permasalahan kesejahteraan sosial dan ekonomi anak, Pemerintah Kota Surabaya membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Kampung Anak Negeri. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pondok Sosial Anak Wonorejo merupakan nama awal organisasi ini ketika didirikan pada tanggal 4 Januari 2009. Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 61 Tahun 2012 yang menjelaskan tentang kerangka administrasi badan khusus yang berada di wilayah hukum Dinas Sosial Kota Surabaya berganti nama menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah Kampung Anak Negeri.

Di bawah pengawasan langsung Dinas Sosial Kota Surabaya, Unit Pelaksana Teknis Daerah Kampung Anak Negeri berfungsi sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah. Tanggung jawab utamanya adalah memberikan layanan sosial dan pendampingan kepada remaja terlantar dan anak jalanan di lingkungan tersebut. Fasilitas tersebut diperlukan untuk memberikan kesempatan pendidikan, pelatihan keterampilan hidup, dan layanan lain yang membantu anak-anak ini berintegrasi ke dalam masyarakat dan menjadi anggota yang produktif.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Kampung Anak Negeri berukuran 40x50 meter ini terletak di Jalan Wonorejo Timur 130 Lingkungan Wonorejo Kecamatan Rungkut Kota Surabaya, Jawa Timur. Ini memiliki berbagai fasilitas yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan rehabilitasi. Semua anak memiliki akses terhadap berbagai program pelatihan pengembangan keterampilan dan kesempatan pendidikan formal dan informal selama mereka berada di sana. Berdasarkan data internalnya, lembaga tersebut menyimpan catatan yang mencakup jumlah anak yang diterima.

Tabel 1. Data Jumlah Anak di Unit Pelaksana Teknis Daerah Kampung Anak Negeri Tahun 2019- 2023

Tahun	Jumlah
2019	37
2020	30
2021	34
2022	36
2023 (Januari-April)	36

Sumber: Unit Pelaksana Teknis Daerah Kampung Anak Negeri

Berdasarkan data di atas, pada tahun 2019 terdapat 37 anak dengan masalah sosial yang masuk ke Unit Pelaksana Teknis Daerah Kampung Anak Negeri, lalu pada tahun 2020 berkurang menjadi 30 anak. Tahun 2021 terdapat 34 anak dan mengalami peningkatan pada tahun 2022 sebanyak 36 anak sampai tahun 2023 (Januari-April). Kemungkinan besar tidak semua anak jalanan sudah tertampung dalam Unit Pelaksana Teknis Daerah Kampung Anak Negeri. Jumlah ini dapat meningkat mengingat tidak semua anak jalanan terdata oleh Badan Pusat Statistik Kota Surabaya.

Ada kebutuhan mendesak untuk kesadaran dan tindakan masyarakat terhadap masalah anak-anak tunawisma. Merupakan keprihatinan setiap orang untuk memastikan bahwa anak-anak ini dapat hidup bermartabat dan hak-hak dasar mereka terpenuhi, mengingat kondisi kehidupan mereka yang buruk. Kota Surabaya telah merespons hal ini dengan meluncurkan inisiatif rehabilitasi sosial yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup generasi muda ini.

Dalam penelitian sebelumnya pada tahun 2021, Efektivitas Program Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Kampung Anak Negeri Kota Surabaya menunjukkan bahwa program pelayanan kesejahteraan anak jalanan belum terlaksana secara efektif karena rendahnya kesadaran, motivasi, dan keinginan dari anak jalanan itu sendiri. Implementasi yang tidak efektif tersebut mengakibatkan tumbuh kembang anak jalanan yang kurang optimal sebagai peserta program pelayanan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, untuk memastikan apakah program ini mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan padatahun 2023, efektivitas inisiatif-inisiatif tersebut perlu dinilai kembali. Selain memungkinkan peninjauan terhadap faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kinerja program, metode evaluasi ini juga mengidentifikasi hambatan apa pun yang menghambat pelaksanaan program. Setelah itu, strategi untuk mengatasi tantangan tersebut dapat diciptakan. Dengan judul “Evaluasi Program Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Jalanan Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Kampung Anak Negeri Kota Surabaya”, kajian ini mengkaji permasalahan yang ada di atas.

2. Tinjauan Pustaka

Evaluasi adalah kegiatan penelitian untuk menggabungkan, mendapatkan dan menyediakan sebuah informasi bagi peneliti agar keputusan yang dihasilkan sesuai dengan standart tertentu. Biasanya ditunjukkan agar dapat menilai sejauh mana keefektifan sebuah kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada bagianya. Dan sejauh mana tujuan tersebut telah dicapai serta melihat sejauh mana kesenjangan antara kenyataan dengan harapan. Evaluasi kebijakan adalah kegiatan atau aktivitas yang menyangkut pemikiran atau penilaian sebuah kebijakan yang menyangkut substansi, implementasi dan dampak (Anderson:1975). Evaluasi kebijakan juga dilihat sebagai suatu kegiatan yang fungsional, yang tidak dilakukan hanya di tahap akhir saja melainkan pada seluruh proses kebijakan.

William N. Dunn menggambarkan evaluasi sebagai proses multifaset yang mencakup evaluasi kebijakan atau program berdasarkan banyak kriteria nilai dalam bukunya tahun 2003 tentang kebijakan publik. Evaluasi ini menggabungkan komponen-komponen seperti klarifikasi, kritik, penyempurnaan, dan penyusunan isu di samping pendekatan yang berfokus pada hasil. Tujuan utamanya adalah untuk segera memantau dan mengevaluasi kinerja guna memudahkan perbaikan di masa depan. Evaluasi adalah metode penelitian yang mengumpulkan, menggabungkan, dan menyajikan data untuk membantu pengambil keputusan mencocokkan hasil dengan standar yang telah ditentukan. Hal ini biasanya dilakukan untuk menentukan seberapa efektif suatu kebijakan dalam praktiknya, seberapa baik tujuannya telah dicapai, dan untuk menemukan perbedaan antara hasil yang telah dicapai dan hasil yang diharapkan pada awalnya.

Menurut Kementerian Sosial RI, rehabilitasi adalah proses pemantapan dan pemulihian kesejahteraan sosial seseorang. Tujuan dari prosedur ini adalah untuk memberikan orang-orang yang berurusan dengan masalah kesejahteraan sosial sumber daya yang mereka perlukan untuk kembali menjadi anggota komunitas dan masyarakat yang produktif pada umumnya.

Serangkaian intervensi yang disebut rehabilitasi sosial ditujukan kepada mereka yang mengalami kesulitan sosial, emosional, atau fisik di masyarakatnya. Memulihkan kesehatan fisik dan mental mereka serta mengintegrasikan mereka kembali ke dalam masyarakat sebagai anggota yang berkontribusi adalah tujuan akhir.

Anak jalanan digambarkan sebagai anak berusia antara 6 dan 18 tahun yang menghabiskan sebagian waktunya bekerja atau berkeliaran di tempat umum seperti jalan-jalan, sesuai aturan yang dikeluarkan Kementerian Sosial Indonesia.

Dalam membantu anak-anak di Kota Surabaya yang menghadapi tantangan sosial, Unit Pelaksana Teknis Daerah juga disebut Unit Pelaksana Teknis Daerah Kampung Anak Surabaya bertindak sebagai organisasi khusus.

3. Metodologi

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode kualitatif dipilih karena hasil temuan data yang diperoleh di lapangan merupakan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berisikan fakta di lapangan. Lokasi penelitian adalah di Unit Pelaksana Teknis Daerah Kampung Anak Negeri yang berada di Wonorejo, Rungkut, Surabaya. Teknik pengumpulan data utama yang akan digunakan berupa wawancara mendalam dan didukung dengan teknik observasi dan studi dokumen. Populasi dalam penelitian

ini adalah keseluruhan anak jalanan di UPTD Kampung Anak Negeri Surabaya yang berjumlah 10 anak jalanan dan yang menjadi sampel adalah sebanyak 4 orang dari anak jalanan tersebut. Uji validitas data menggunakan teknik triangulasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif Miles & Huberman yang dikutip dari (Sugiyono, 2014) yang memiliki beberapa tahap yaitu: reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Tahap reduksi data merupakan penyederhanaan, penggolongan, dan membuang data yang tidak perlu. Tahap kedua yaitu penyajian data merupakan kegiatan saat sekumpulan data disusun secara sistematis agar mudah dipahami. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi data merupakan tahap mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

4. Hasil dan Pembahasan

Evaluasi adalah serangkaian proses pengawasan atas pelaku perubahan serta kelompok sasaran program yang telah diajukan, apakah program tersebut berhasil atau sesuai apa yang diinginkan ayau tidak. Dapat dikatakan evaluasi merupakan suatu penilaian dan mengawasi dari suatu pelaksanaan kejadian atau peristiwa sehingga kita dapat menarik kesimpulan dari kejadian atau peristiwa itu sendiri. Tolok ukur atau metrik tertentu diperlukan untuk mengevaluasi kinerja suatu program. Standar penilaian suatu kebijakan mencakup indikator-indikator penting berikut ini, sebagaimana dikemukakan oleh William N. Dunn dalam bukunya “Pengantar Analisis Kebijakan Publik” (2003:610) efektivitas, efisiensi, kecukupan, keadilan, daya tanggap dan presisi.

a. Efektivitas

Efektivitas adalah sejauh mana seseorang atau organisasi mencapai tujuan yang diinginkan. Singkatnya, semakin banyak tujuan yang berhasil dicapai suatu operasi, maka dianggap semakin efektif operasi tersebut.

Mencapai hasil yang diharapkan dan menyelesaikan tujuan yang telah ditentukan merupakan ciri efektivitas. Program rehabilitasi sosial Unit Pelaksana Teknis Daerah Kampung Anak Negeri tampaknya telah berhasil dalam beberapa hal. Program rehabilitasi sosial bisa dikatakan sudah tercapai, dari segi pendidikan, bimbingan yang ditawarkan, fasilitas dan tenaga kerja yang mencukupi sudah terlaksana dengan baik, terlihat dari semua anak yang ada di Unit Pelaksana Teknis Daerah Kampung Anak Negeri bersekolah reguler dan kejar paket, banyaknya bimbingan berupa spiritual, bimbingan jasmani, bimbingan minat bakat, bimbingan kognitif, dan bimbingan sosial yang semuanya berjalan dengan baik, fasilitas yang mencukupi mulai dari ruangan yang luas, lapangan, sarana dan prasarana untuk minat bakat yang memadai, serta tenaga kerja yang cukup untuk membina anak jalanan tersebut. Namun untuk tujuan membuat anak jalanan menjadi pribadi yang mandiri ini masih belum sepenuhnya tercapai, karena masih banyak anak yang kurang sadar diri akan pentingnya masa depan yang menanti mereka. Mereka masih berbuat nakal, suka berkelahi, tidak disiplin, dan malas belajar. Oleh karena itu perlunya motivasi untuk anak-anak dari pembina dan pendamping untuk anak-anak agar menjadi pribadi yang lebih baik dan sadar akan kehidupan masa depan.

b. Efisiensi

Efisiensi mengukur seberapa baik suatu kebijakan diterapkan dengan mempertimbangkan biaya dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Program rehabilitasi sosial Unit Pelaksana Teknis Daerah Kampung Anak Negeri yang diprakarsai pemerintah

merupakan salah satu contoh efektivitas program ini. Hal ini ditunjukkan oleh kemampuan program dalam menyediakan berbagai layanan pendampingan untuk membantu anak jalanan dalam memperoleh hak-hak hukum mereka sambil memanfaatkan sumber daya yang tersedia sebaik-baiknya.

Dalam kerangka ini, "bimbingan" mencakup berbagai bentuk bimbingan, termasuk pelatihan fisik, pertumbuhan kognitif, dukungan emosional dan spiritual, promosi bakat dan minat individu, dan pelatihan keterampilan sosial. Semua bimbingan ini bertujuan agar anak jalanan dapat memiliki perilaku mental, sosial, dan fisik yang baik untuk bersikap adaptif dan normatif, memperoleh ketrampilan yang dapat menjadi sumber kehidupan sosial masyarakat ke depannya. Program rehabilitasi sosial ini sebagai bentuk penanganan anak-anak yang masalah sosial dengan menawarkan kegiatan yang berpotensi dalam mencerdaskan dan mencerahkan kehidupan untuk masa depan mereka. Antusiasme para anak jalanan dan anak bermasalah sosial lainnya dalam mengikuti berbagai pembinaan sebagai bentuk penyaluran kreatifitas mereka, dapat dikatakan bahwa keefisien dari program rehabilitasi sosial sudah berjalan sesuai yang diinginkan.

c. Kecukupan

Pencapaian tujuan sampai tingkat yang memuaskan disebut dengan kecukupan dalam kebijakan publik. Menentukan seberapa baik kebijakan dalam mengatasi masalah yang ingin diatasi merupakan faktor penting untuk dipertimbangkan ketika mengevaluasi kemanjurannya. Kemanjuran suatu inisiatif ditentukan oleh seberapa baik inisiatif tersebut dapat menghilangkan hambatan terhadap kesejahteraan masyarakat secara umum. Program dirancang untuk mengurangi masalah sosial.

Kecukupan dalam kebijakan program rehabilitasi sosial UPTD Kampung Anak Negeri memiliki hasil yang baik dan sesuai dengan indikator kecukupan. Hal tersebut ditandai dengan adanya pernyataan dari pihak kepala UPTD Kampung Anak Negeri dan pembina yang menyebutkan bahwa pencapaian hasil program rehabilitasi sosial sudah berjalan dengan baik dengan mengupayakan kebutuhan-kebutuhan penting anak jalanan di UPTD Kampung Anak Negeri agar anak jalanan ini mendapatkan kembali haknya sebagai seorang anak yaitu bersekolah, bermain, dan makan dengan cukup. UPTD Kampung Anak Negeri juga memberikan fasilitas yang baik dan dianggap sudah lengkap seperti tersedianya air, listrik, wifi, kamar yang cukup luas, dan peralatan minat bakat yang memadai. Fasilitas tersebut merupakan kebutuhan yang penting untuk anak jalanan agar hidup mereka lebih nyaman.

Pembangunan program rehabilitasi sosial UPTD Kampung Anak Negeri diharapkan dapat memberikan masa depan yang lebih baik untuk anak-anak jalanan yang memiliki permasalahan sosial, sehingga dengan adanya kebijakan ini hidup mereka akan lebih terjamin serta memberikan perubahan dari segi pendidikan, moral, ekonomi, dan sosial.

d. Pemerataan

Distribusi manfaat dan kewajiban yang adil di antara populasi sasaran disebut sebagai pemerataan dalam konteks kebijakan publik. Ketika suatu kebijakan berorientasi pada keadilan, maka kebijakan tersebut menjamin bahwa masyarakat yang terkena dampaknya akan berbagi dampaknya secara adil. Pengeluaran dan manfaat suatu program harus didistribusikan secara merata dan adil agar tidak hanya dianggap tepat, efisien, dan efektif, namun juga adil.

Konsep keadilan dalam kebijakan publik mengacu pada alokasi manfaat dan biaya program yang adil kepada pihak-pihak yang terkena dampaknya. Memprioritaskan keadilan dalam pembuatan

kebijakan bertujuan untuk menjamin distribusi hasil dan dampak yang adil. Selain tepat, efektif, dan efisien, program yang menyeluruh juga perlu mendistribusikan manfaat dan sumber dayanya dengan cara yang dianggap adil bagi semua pihak. Apabila ada anak jalanan yang bukan dari Surabaya, maka Dinas Sosial Kota Surabaya akan menghubungi Dinas Sosial asal kota anak tersebut untuk ditindak lanjuti. Untuk kebutuhannya terbilang sudah terpenuhi, tidak ada kekurangan baik dari segi kebutuhan sehari-hari, kebutuhan sekolah, dan biaya kesehatan. Untuk uang saku, per anak akan diberi sebesar Rp.10.000 setiap hari. Makanan mereka juga terpenuhi dengan baik dan menjadi salah satu kebutuhan yang menghabiskan banyak anggaran karena Unit Pelaksana Teknis Daerah Kampung Anak Negeri sadar akan pentingnya gizi yang seimbang untuk anak jalanan agar kesehatan mereka terjamin dan dapat tumbuh dengan baik. Pola makanan harus dijaga karena sangat penting untuk tumbuh kembang anak-anak. Makanan tersebut juga sudah dihitung gizinya agar anak jalanan tidak kekurangan gizi, mencegah kondisi kelebihan atau kekurangan berat badan, mendukung tumbuh kembang anak-anak dan mencegah timbulnya masalah kesehatan. Tidak hanya gizinya yang tercukupi, menu tersebut juga bervariasi selama 15 hari agar anak jalanan tidak bosan dengan makanan yang itu-itu saja.

Jika diukur dengan kriteria pemerataan, program rehabilitasi sosial Unit Pelaksana Teknis Daerah Kampung Anak Negeri terlihat efektif karena anak-anak sasaran program benar-benar merasakan manfaatnya. Dana pemerintah yang dimanfaatkan dengan baik dan fasilitas yang ditawarkan menjadi contoh bagaimana tujuan dan sasaran program dapat tercapai. Sasaran-sasaran ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan kebijakan dan tolok ukur untuk menentukan apakah kebijakan tersebut dilaksanakan sesuai rencana.

e. Responsivitas

Istilah “Responsivitas” menggambarkan seberapa baik suatu kebijakan dapat bermanfaat bagi masyarakat setelah kebijakan tersebut diimplementasikan. Setelah memproyeksikan dampak kebijakan yang diantisipasi, evaluasi keberhasilan kebijakan mencakup penilaian opini publik.

Dapat disimpulkan bahwa sasaran dari program rehabilitasi sosial tersebut cukup memuaskan, karena dari tanggapan para anak jalanan tentang program rehabilitasi sosial sangat responsif dan cenderung positif dalam menjalani program rehabilitasi sosial. Walaupun dalam implementasinya ditemui beberapa masalah yaitu anak jalanan yang tidak betah dan memutuskan untuk kabur dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Kampung Anak Negeri, meskipun mereka akan kembali, namun sejauh ini masih banyak anak-anak yang memiliki antusias tinggi dalam program rehabilitasi sosial ini. Responsivitas dalam program rehabilitasi sosial untuk anak jalanan sudah dilakukan dengan cukup optimal dan mendapat respon baik dari anak jalanan tersebut.

Responsivitas dalam program rehabilitasi sosial untuk anak jalanan sudah dilakukan dengan cukup optimal dan mendapat respon baik dari anak jalanan tersebut. Program ini memberikan dampak yang sangat baik, dimulai dari pendidikan lebih terjamin, kesehatan yang terjamin, kenyamanan dan mampu memberikan pilihan masa depan yang lebih baik. Setiap kebijakan program rehabilitasi sosial ini dapat dirasakan manfaatnya oleh sasaran program tersebut. Serta beberapa harapan anak jalanan agar program ini berjalan dengan baik dengan mengedepankan kenyamanan lingkungan, serta merawat fasilitas sarana dan prasarana yang ada. Dalam konteks kebijakan, Responsivitas mengacu pada seberapa selaras tujuan suatu kebijakan dengan tanggapan yang diperoleh dari masyarakat yang ingin dipengaruhi. Survei opini publik yang dilakukan setelah suatu kebijakan diimplementasikan sering kali digunakan untuk menilai efektivitas kebijakan tersebut, terutama jika dibandingkan dengan estimasi dampak awal.

f. Ketepatan

Relevansi suatu program ditentukan oleh kualitas dan pentingnya tujuan serta kekuatan teori yang mendasari tujuan tersebut. Ketepatan adalah kriteria untuk memilih di antara beberapa solusi yang layak dengan tujuan menentukan solusi mana yang layak dan sesuai untuk disarankan.

Indikator yang tepat menunjukkan bahwa proyek perbaikan sosial dapat secara efektif menangani masalah anak-anak tuna wisma. Bagi anak-anak ini, program ini menawarkan lingkungan yang aman dengan peralatan yang memadai. Tujuan program ini telah terealisasi dengan tepat, dan telah membantu menurunkan jumlah anak tuna wisma. Tidak hanya itu, banyak dari anak-anak ini yang mendapatkan pekerjaan setelah lulus sekolah atau keluar dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Kampung Anak Negeri. Selain memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, program ini juga menarik minat mereka karena memberikan mereka kelas khusus untuk pengembangan keterampilan. Di bidang ini, banyak anak yang berhasil. Oleh karena itu, program rehabilitasi sosial Unit Pelaksana Teknis Daerah Kampung Anak Negeri terbukti berhasil dan efisien. Hal tersebut dapat dilihat dari prestasi yang membanggakan dari anak binaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kampung Anak Negeri dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Prestasi anak binaan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Kampung Anak Negeri

Nama	Prestasi
Moch. Hasyim	Juara 1 Kejuaraan Atletik 60 meter Antar SD se-Kota Surabaya Juara 2 Kejuaraan Pencak Silat Piala IPSI Kota Surabaya Juara 1 Pencak Silat Tapak Suci Usia Dini se-Kota Surabaya
Ari Mukti	Juara 3 Kejuaraan Nasional Balap Sepeda Criterium Piala Walikota Tegal Juara 1 Pertandingan Tinju 38 kg, Kejurda Tinju Amatir Youth se-Jawa Timur 2017
Bledheg Sngheha	Juara 1 Pertandingan Tinju Piala KONI Kota Surabaya 2016 Juara 1 Pertandingan Wushu Piala KONI Kota Surabaya
Marfel Maulana	Juara 3 Kejuraan Balap Sepeda MTB Piala KONI Kota Surabaya
Luhur Aditya Prasoja	Juara 3 Kejuaraan Balap Sepeda Usia Dini ke 3 Trophy Ketua ISSI Jawa Tengah
Syafi'i	Juara 1 Cabang Tinju 55 kg Tingkat Jawa Timur
Hendra	Juara 2 Balap Sepeda Tingkat Nasional Tahun 2015
Rajes	Juara 1 Pencak Silat Kelas Bebas Tahun 2017

Data pada tabel tersebut menunjukkan bahwa kondisi anak-anak di Unit Pelaksana Teknis Daerah Kampung Anak Negeri cukup baik. Bimbingan bakat yang mereka terima telah memberikan hasil yang baik bagi individu dan memberikan hasil yang baik. Hal ini dapat menjadi motivasi bagi anak-anak tunawisma lainnya untuk fokus mengembangkan kemampuannya dan meraih kesuksesan di bidangnya. Pencapaian yang dicapai menunjukkan bahwa program rehabilitasi sosial Unit Pelaksana Teknis Daerah Kampung Anak Negeri berjalan secara efisien dan berhasil mendorong pengembangan keterampilan baru di kalangan generasi muda.

5. Kesimpulan

Berdasarkan uraian peneliti dari keseluruhan investigasi menunjukkan bahwa program rehabilitasi sosial Unit Pelaksana Teknis Daerah Kampung Anak Negeri terhadap anak jalanan di Kota Surabaya berjalan dengan baik ditinjau dari semua kriteria penting, seperti daya tanggap, ketepatan, efisiensi, efektifitas, dan kecukupan. Anak-anak jalanan yang mengikuti program ini

menunjukkan hal ini melalui perilaku dan dedikasi mereka; mereka mengikuti aturan yang ditetapkan dan menunjukkan keinginan besar untuk memperbaiki peluang masa depan mereka.

Saran dari penulis agar program ini dapat diteruskan dengan sebuah perbaikan atas hal-hal yang kurang sesuai. Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

- a. Pihak Unit Pelaksana Teknis Daerah Kampung Anak Negeri perlu memberikan sosialisasi dan upaya menumbuhkan minat para anak jalanan untuk mengikuti program minat bakat agar kemampuan mereka dalam bidang non akademik terasah.
- b. Pembina perlu mengembangkan metode belajar yang kreatif dan menyenangkan seperti pembelajaran karyawisata, pembelajaran dengan menggunakan gambar atau objek yang menarik, lebih memperbanyak praktikum agar anak jalanan tidak mudah bosan dan dapat fokus belajar.
- c. Pembina dan pendamping Unit Pelaksana Teknis Daerah Kampung Anak Negeri diharapkan membuat program perlombaan, seperti mengadakan lombat cerdas cermat untuk mengasah pengetahuan atau lomba debat untuk mengasah anak dalam berbicara dengan hadiah yang menarik.
- d. Unit Pelaksana Teknis Daerah Kampung Anak Negeri dapat mempertahankan konsistensi untuk memberikan bimbingan-bimbingan yang sudah ada dan terus meningkatkan kemampuan para anak jalanan serta anak binaan lainnya demi kelanjutan hidup mereka di masa depan.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik Jawa Timur.
<https://jatim.bps.go.id/statictable/2019/10/16/2044/penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur-2017.html> . 15 Oktober 2022 (10:54)
- Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html> . 15 Oktober 2022 (10:25).
- Balitbang Departemen Sosial RI, Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial (Jakarta: Ballitbang Departemen Sosial RI, 2003. h. 3.
- Databoks. 2022. Terus Meningkat, Jumlah Penduduk RI Tembus 275, 77 Juta hingga Pertengahan 2022. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/07/terus-meningkat-jumlah-penduduk-ri-tembus-275-77-juta-hingga-pertengahan-2022> . 15 Oktober 2022 (11:03)
- Departemen Sosial, R. I. (2001). Intervensi psikososial. *Jakarta: Departemen Sosial*.
- Indonesia, K. B. B. (1998). Jakarta: Pustaka Amanu.
- Miles, Matthew B, A. Michael Huberman dan Johnny Saldana. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications, Inc.
- Moleong, L. J. (2011). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
- Permensos Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial.
- Perwali No. 61 Tahun 2012 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kampung Anak Negeri pada Dinas Sosial Kota Surabaya.

- Sri Sanituti Hariadi dan Bagong Suyanto. (1999). *Anak Jalanan Di Jawa Timur: Masalah Dan Upaya Penanganannya*. Surabaya : Airlangga university Press.
- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- William, D. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua*. Gajah Mada Univercity Press.